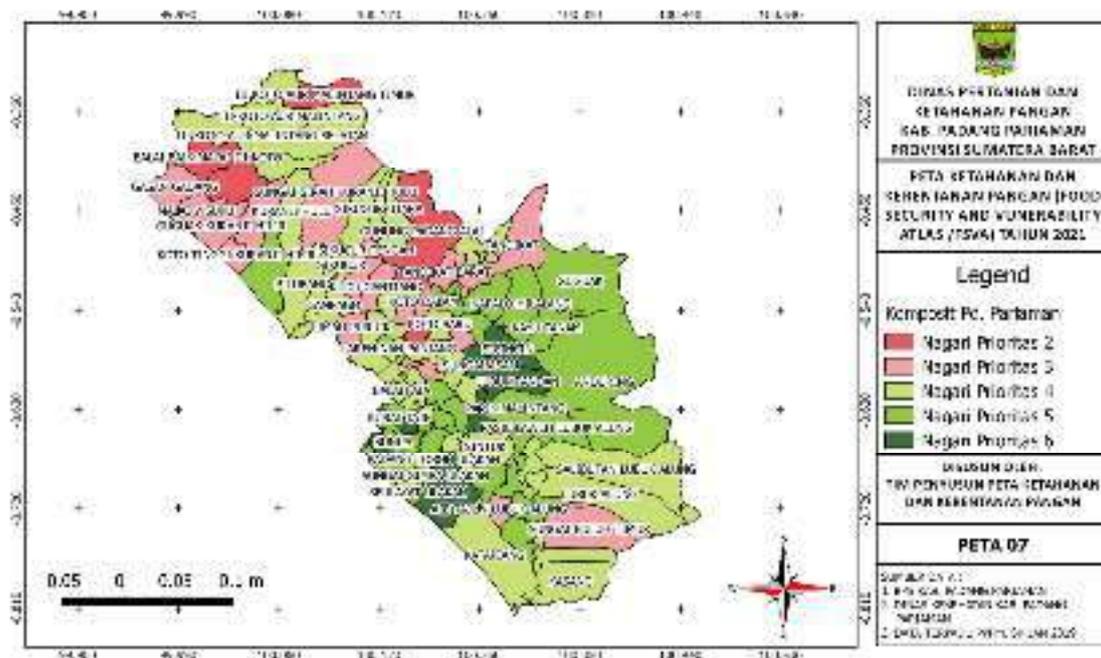


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN / FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

1.3. Metodologi

BAB II KETERSEDIAAN PANGAN

2.1. Sarana dan Prasarana Ekonomi

2.2. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

BAB III AKSES PANGAN

3.1. Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga

3.2. Akses Penghubung

3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan

BAB IV PEMANFAATAN PANGAN

4.1. Akses Air Bersih

4.2. Akses Tenaga Kesehatan

4.3. Strategi Pemenuhan Pangan

BAB V KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

5.1. Kondisi Ketahanan Pangan

5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat diselesaikan memenuhi amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 penyusunannya dipandu oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

Selanjutnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat diadakanjuti dalam perencanaan program setiap sektor pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan harapan upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas di Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai.

Pariaman, November 2021
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kab. Padang Pariaman



RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ketahanan pangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; dan (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; dan (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; dan (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan/nagari diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan/nagari di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan/nagari di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan

rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2021 menunjukkan bahwa nagari rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 23 nagari dari 103 nagari (22,33%) yang terdiri 5 nagari (4,85%) Prioritas 2; dan 18 nagari (17,48%) Prioritas 3. Nagari prioritas 2 tersebar di 5 kecamatan diantaranya 1 nagari kecamatan VII Koto Sungai Sarik, V Koto Timur, Batang Gasan dan 2 Nagari di kecamatan IV Koto Aur Malintang. Nagari Prioritas 3 tersebar 18 Nagari di 10 kecamatan, antara lain 1 nagari di Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, VII Koto Sungai Sarik dan V Koto Kampung Dalam, 2 nagari di Kecamatan Padang Sago, Sungai Limau, Batang Gasan dan Sungai Geringging, dan 3 Nagari di Kecamatan Patamuhan dan Kecamatan V Koto Timur.
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan
 - a. Kondisi ekonomi, politik, sosial dan keamanan
 - b. Sarana dan prasarana publik yang baik
 - c. Teknologi yang dikembangkan
 - d. Jumlah lahan dalam menjaga ketahanan pangan
 - e. Iklim dan cuaca yang baik dapat mempengaruhi produktivitas pertanian
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
 - c. Penyediaan tenaga kesehatan
 - d. Jumlah lahan yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan 103 (seratus tiga) nagari dengan total penduduk sebesar 430.626 jiwa (BPS) pada tahun 2020. Kabupaten Padang Pariaman secara astronomis terletak antara $0^{\circ} 19' 15,68''$ - $0^{\circ} 48' 59,868''$ Lintang Selatan dan antara $99^{\circ} 57'43,325''$ - $100^{\circ} 27' 28,94$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Padang Pariaman di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia. Secara klimatologis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki curah hujan 4.678 mm per tahun dan jumlah hari hujan 246 hari per tahun.

Luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah daratan seluas 1.343,09 km² terdiri dari Kecamatan Lubuak Aluang, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang, Kecamatan VII Koto, Kecamatan V Koto, Kecamatan Sungai Garinggiang, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan VII Koto Padang Sago, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto Patamuan, Kecamatan Anam Lingkuang (Berdasarkan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2019). Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah yang paling luas, yakni 188,55 Km², setelah itu

Kecamatan Batang Anai dengan luas wilayah 164,68 Km², kemudian Kecamatan Lubuak Aluang dengan luas wilayah 124,77 Km², dan Kecamatan Ulakan Tapakih yang memiliki luas terkecil, yakni 23,01 Km².

Kabupaten Padang Pariaman beberapa kecamatan berbatasan dengan pantai antara lain : Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan V Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakih dan Kecamatan Batang Anai. Ketinggian wilayah Kabupaten Padang Pariaman beragam yang terendah 25 m dari permukaan laut (Kecamatan Ulakan Tapakih) dan yang tertinggi 1.925 m dari permukaan laut (Kecamatan Patamuan).

Disamping memiliki pantai yang indah, Kabupaten Padang Pariaman juga dilewati oleh 11 (sebelas) sungai yaitu Batang Anai sepanjang 54,6 Km, Batang Tapakis sepanjang 46,0 Km, Batang Mangau sepanjang 46,0 Km, Batang Naras sepanjang 20,0 Km, Batang Gasan sepanjang 20,0 Km, Batang Ulakan sepanjang 19,0 Km, Batang Sungai Sirah sepanjang 18, 0 Km, Batang Paingan sepanjang 16,0 Km, Batang Sungai Limau sepanjang 14,0 Km, Batang Kamumuan sepanjang 12,0 Km dan Batang Piaman sepanjang 12,0 Km.

Penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 415.613 jiwa, dan tahun 2020 meningkat menjadi 430.626 jiwa, dengan komposisi 215.038 jiwa penduduk laki-laki dan 215.588 jiwa penduduk perempuan.

Berpedoman pada luas wilayah 1.343,09 km² dan jumlah penduduk 430.626 jiwa pada tahun 2020, maka kepadatan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebanyak 321 jiwa/km². Berturut-turut Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah (1) Kecamatan Ulakan Tapakih dengan kepadatan

penduduk sebanyak 898 jiwa/km²; (2) Kecamatan Anam Lingkuang dengan kepadatan penduduk sebanyak 601 jiwa/km²; (3) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan kepadatan penduduk sebanyak 590 jiwa/km², (4) Kecamatan VII Koto dengan kepadatan penduduk sebanyak 560 jiwa/km², (5) Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang dengan kepadatan penduduk sebanyak 461 jiwa/km²; (6) Kecamatan Nan Sabaris dengan kepadatan penduduk sebanyak 454 jiwa/km², (7) Kecamatan Lubuk Aluang dengan kepadatan penduduk sebanyak 376 jiwa/km²; (8) Kecamatan V Koto dengan kepadatan Penduduk sebanyak 354 Jiwa/km², (9) Kecamatan Sungai Limau dengan kepadatan penduduk sebanyak 330 jiwa/km², (10) Kecamatan Batang Anai dengan kepadatan penduduk sebanyak 321 jiwa/km²; (11) Kecamatan Sungai Garinggiang dengan kepadatan Penduduk sebanyak 297 jiwa/km² (12) Kecamatan IV Koto Aua Malintang dengan kepadatan penduduk sebanyak 249 jiwa/km², (13) Kecamatan Padang Sago dengan kepadatan penduduk sebanyak 248 jiwa/km²; (14) Kecamatan Patamuan dengan kepadatan penduduk sebanyak 224 jiwa/km², (15) Kecamatan V Koto Timur dengan kepadatan penduduk sebanyak 217 jiwa/km², (16) Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam dengan kepadatan penduduk sebanyak 149 jiwa/km²; dan yang terakhir adalah Kecamatan Batang Gasan dengan kepadatan. penduduk sebanyak 144 jiwa/km².

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 17,94 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 3,31 triliun rupiah atau sekitar 15,57% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 21,25 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha imbas dari pandemi covid 19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2020 tercatat sebesar -10,46 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman ini mengalami kontraksi dari 2,40% di tahun 2019. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi total dari seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2016 – 2020) struktur perekonomian Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Transportasi dan pergudangan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor; dan Konstruksi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 22,66 % (angka ini naik dari 19,90 % di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu mencapai 16,33 % (turun dari 31,92 % di tahun 2016). Disusul oleh lapangan usaha industry Pengolahan sebesar 11,19 % (naik dari 10,74 % ditahun 2016). Berikutnya, kontribusi lapangan usaha Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor sebesar 10,53 % (naik dari 8,42% di tahun 2016) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 10,16 % (naik dari 7,37% ditahun 2016)

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten/Kota dengan analisis sampai tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten/Kota pada tahun 2021.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten/Kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten/Kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

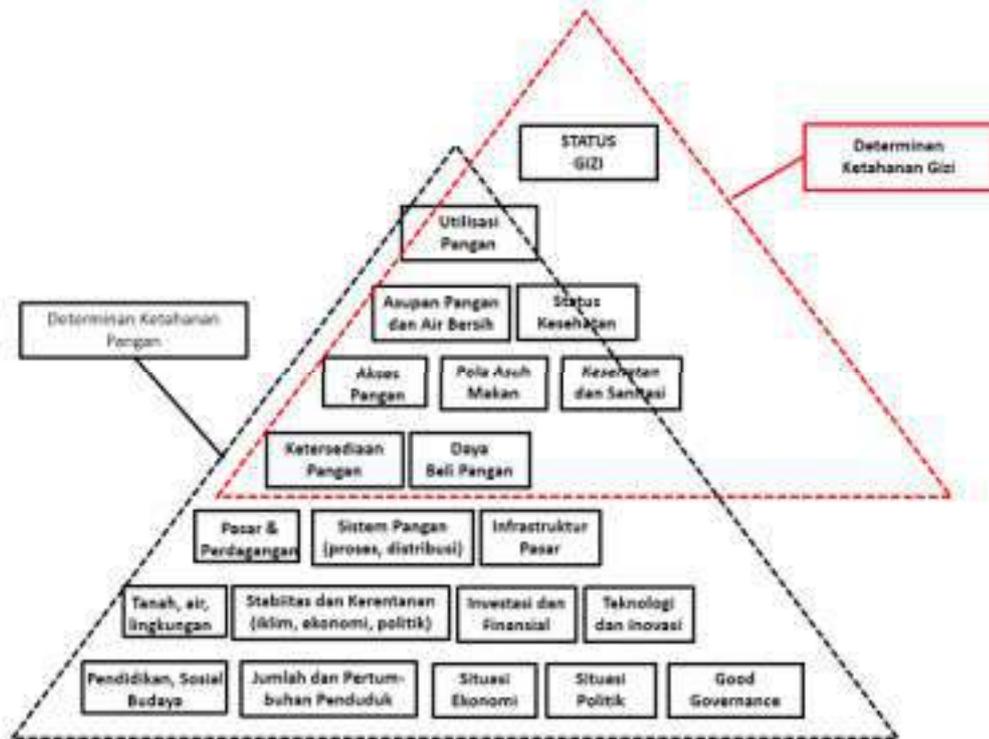
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan hygiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

(Sumber: FAO dan UNSCN)

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistim

kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dan lain-lain.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten/Kota didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2021

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk nagari	- Kabupaten dalam angka tahun 2021 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung,	- Kecamatan dalam angka

Indikator	Definisi	Sumber Data
terhadap jumlah rumah tangga	restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga nagari	2021, Podes 2019/BPS
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk nagari	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk nagari	Update Potensi Desa 2020, BPS
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Nagari dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Nagari dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Update Potensi Desa 2020, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga nagari	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga nagari	Data Terpadu PPFM, SK Jan 2019

Indikator	Definisi	Sumber Data
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk nagari	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk nagari	Potensi Desa 2018, BPS

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International*

Food Policy Research Institute (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk nagari	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga nagari	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk nagari	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan/nagari ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-

masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K_j = \sum_{i=1}^n a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan/nagari yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan/nagari yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu

indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan³. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman, 15 nagari masuk dalam prioritas 1 (14.56 %), 16 nagari prioritas 2 (15.53 %) dan 21 nagari prioritas 3 (20.40 %).

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Nagari	Persentase
1	0.3551	15	14.56
2	0.3428	16	15.53
3	0.3317	21	20.40
4	0.3141	20	19.42
5	0.2983	16	15.53
6	0	15	14.56

³ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan

2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 22,66 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Padang Pariaman yang menyumbang hampir 96,9 % dari total produksi serealial kabupaten. Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, produksi umbi-umbian di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dan penurunan sejak tahun 2016. Peningkatan dan penurunan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Produksi padi dari pencapaian produksi 287.046 ton tahun 2016 menjadi 283.127 pada tahun 2020.

Tabel 2.2 Produksi Serealial Pokok dan Umbi-umbian 2016 - 2020 (Ton)

Serealial	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata 5 tahun
Padi	287.046	321.376	280.892	293.360	283.127	293.160
Jagung	54.848	80.270	60.524	53.467	33.945	56.611
Ubi Kayu	18.191	11.725	7.705	10.297	7.507	11.085

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016-2020, BPS

Tahun 2020, total produksi sereal dan umbi-umbian mencapai 283.127,72 ton padi, 33.945,44 ton jagung, 7.506,79 ton ubi kayu. Total produksi sereal dan laju pertumbuhan produksi tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan sebesar 9.86 %, yaitu dari total produksi tahun 2016 sebesar 360.085 ton menjadi 324.579 ton pada tahun 2020. Sebaran total produksi sereal selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 413.371 ton dan terkecil pada tahun 2020. Produksi sereal pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Produksi Total Sereal per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi
(2016-2020)

Kecamatan	Produksi Total Sereal				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Batang Anai	52.120,69	66.450,2	52.193,17	47.752,51	44.125,40
2. Lubuk Alung	75.526,52	91.774,56	75.812,5	77.092,7	56.501,64
3. Sintuk Toboh Gadang	13.600,06	18.548,23	16.003,7	17.261,32	13.541,97
4. Ulakan Tapakis	24.914,28	24.644,96	17.995,9	20.287,86	19.742,24
5. Nan Sabaris	3.036,10	17.234,58	15.208,08	15.423,61	14.333,1
6. 2 x 11 Enam Lingkung	10.512,32	9.621,75	8.498,58	8.775,9	6.268,64
7. Enam Lingkung	18.884,16	19.972,00	21.640,19	19.665,94	20.578,98
8. 2 x 11 Kayutanam	19.720,22	25.619,38	20.300,93	18.464,55	21.550,35
9. VII Koto	21.567,28	23.476,60	17.748,78	19.646,19	18.678,70
10. Patamuan	11.210,07	16.741,77	9.792,43	13.417,69	14.165,01
11. Padang Sago	5.099,01	4.888,20	4.569,61	4.539,05	4.428,26
12. V Koto Kpg Dalam	15.727,48	11.932,00	12.896,28	13.452,20	12.663,09
13. V Koto Timur	8.915,95	9.006,74	8.725,42	8.647,12	7.076,84
14. Sungai Limau	15.125,19	16.570,07	15.670,91	17.746,57	17.307,39
15. Batang Gasan	10.246,26	11.197,51	13.253,69	12.162,61	11.433,27
16. Sungai Garinggiang	17.005,74	17.917,27	16.140,90	15.695,60	16.772,87
17. IV Koto Aur Malintang	23.873,68	27.293,32	22.751,59	27.102,89	25.412,21
Jumlah		412.889,44	354.301,18	357.124,31	324.579,95

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016-2020, BPS

Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 tahun terakhir (2016-2020) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2017 hampir di semua kecamatan. Peningkatan terjadi di kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Nan Sabaris, 2 x 11 Kayutanam, VII Koto, Patamuan, Padang Sago, Sungai Geringging, dan IV Koto Aur Malintang. Produksi padi tertinggi di kecamatan Lubuk Alung sebesar 51.037,30 ton.

Tabel 2.4 Produksi Padi 2016 - 2020 (Ton)

Kecamatan	Padi				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Batang Anai	34.597,59	39.742,92	34.730,35	37.943,48	38.938,63
2. Lubuk Alung	47.021,02	51.037,30	47.716,85	49.465,22	42.305,67
3. Sintuk Toboh Gadang	11.433,69	15.825,28	13.713,10	14.767,92	12.066,87
4. Ulakan Tapakis	23.294,48	23.092,96	17.412,85	18.331,20	18.331,20
5. Nan Sabaris	1.769,60	15.974,03	14.646,55	14.646,04	13.477,00
6. 2 x 11 Enam Lingkung	9.441,82	9.170,00	7.919,23	8.404,50	5.941,84
7. Enam Lingkung	15.885,06	15.977,36	18.271,24	17.239,34	17.521,93
8. 2 x 11 Kayutanam	19.017,82	24.633,73	19.784,81	18.421,35	21.456,90
9. VII Koto	18.206,03	22.039,91	16.336,11	17.032,26	16.606,08
10. Patamuan	11.210,07	16.741,77	9.792,43	12.884,40	14.005,17
11. Padang Sago	4.777,01	4.880,20	4.200,00	4.305,15	4.222,10
12. V Koto Kpg Dalam	15.633,98	11.813,00	12.536,45	13.336,20	12.513,60
13. V Koto Timur	8.194,45	8.620,66	8.374,35	8.243,92	6.846,84
14. Sungai Limau	13.866,79	15.881,32	14.987,73	16.762,08	16.774,27
15. Batang Gasan	9.302,96	9.946,51	10.470,57	9.275,83	9.382,62
16. Sungai Geringging	13.541,00	14.726,95	12.996,14	12.127,50	14.639,52
17. IV Koto Aur Malintang	16.852,63	21.272,10	17.003,21	20.173,92	18.097,49
Jumlah	287.046,00	321.376,00	280.892,00	293.360,31	283.127,72

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016-2020, BPS

Jagung

Pada tahun 2020, produksi jagung mencapai 33.945,44 ton. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan 57,51 %. Penurunan produksi pada tahun 2020 disebabkan karena keterlambatan dan pengurangan program bantuan bibit jagung. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 80.270 ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Lubuk Alung sebesar 39.509,55 ton, menyusul Kecamatan Batang Anai sebesar 23.150,76 ton dan terendah Kecamatan Patamuan sebesar 0 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Produksi Jagung 2016 - 2020 (Ton)

Kabupaten	Jagung				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Batang Anai	12.884,96	23.150,76	14.706,66	6.926,21	3.627,00
2. Lubuk Alung	26.574,40	39.509,55	27.251,64	25.942,68	13.737,87
3. Sintuk Toboh Gadang	1.782,61	2.621,23	2.055,40	1.851,85	1.219,40
4. Ulakan Tapakis	1.477,00	1.494,00	507,75	1.872,56	1.137,60
5. Nan Sabaris	501,50	348,50	269,37	308,31	471,20
6. 2 x 11 Enam Lingkung	136,00	161,50	317,25	242,76	100,63
7. Enam Lingkung	549,10	847,45	800,58	925,60	891,25
8. 2 x 11 Kayutanam	505,60	389,50	438,84	43,20	93,45
9. VII Koto	867,75	1.263,08	1.073,37	552,00	157,50
10. Patamuan	0	0	0	533,29	159,84
11. Padang Sago	43,00	8,00	318,75	34,50	0
12.V Koto Kpg Dalam	93,50	119,00	359,83	116,00	149,49
13. V Koto Timur	76,50	34,00	249,75	403,20	230,00
14. Sungai Limau	813,40	539,50	631,68	902,92	533,12
15. Batang Gasan	896,80	1.192,00	2.757,55	2.805,28	2.050,65
16. Sungai Garinggiang	2.322,34	3.190,32	3.063,07	3.321,38	2.004,60
17. IV Koto Aur Malintang	5.323,55	5.401,62	5.722,50	6.685,25	7.181,84
Jumlah	54.848,01	80.270,00	60.524,00	53.467,04	33.945,44

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016-2020, BPS

Ubi Kayu

Produksi ubi kayu menurun dari 18.191,00 ton pada tahun 2016 menjadi 7.506,79 ton pada tahun 2020. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2020 meliputi kecamatan Enam Lingkung Rincian produksi ubi kayu tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Produksi Ubi Kayu 2016 - 2020 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Batang Anai	4.638,14	3.556,52	2756,16	2.882,82	1.559,77
2. Lubuk Alung	1.931,10	1.227,71	844,01	1.684,80	458,10
3. Sintuk Toboh Gadang	383,76	101,72	235,20	641,55	255,70
4. Ulakan Tapakis	142,80	58,00	75,30	84,10	73,44
5. Nan Sabaris	765,00	912,05	292,16	469,26	384,90
6. 2 x 11 Enam Lingkung	934,50	290,25	261,10	128,64	226,17
7. Enam Lingkung	2.450,00	3.147,19	2.568,37	1.491,00	2.165,80
8. 2 x 11 Kayutanam	196,80	138,20	77,28	0	0
9. VII Koto	2.493,50	1.047,19	339,30	2.061,93	1.915,12
10. Patamuan	0	0	0	0	0
11. Padang Sago	279,00	65,60	50,86	199,40	206,16
12.V Koto Kpg Dalam	0	0	0	0	0
13. V Koto Timur	645,00	352,06	101,32	0	0
14. Sungai Limau	445,00	149,25	51,50	81,52	0
15. Batang Gasan	46,50	59,00	25,57	81,50	0
16. Sungai Garinggiang	1.142,40	0	81,69	246,72	128,75
17. IV Koto Aur Malintang	1.697,50	619,60	25,88	243,72	132,88
Jumlah	18.191,00	11.725,00	7.786,69	10.296,96	7.506,79

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016-2020, BPS

2.1. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman 16 nagari masuk dalam prioritas 1 (15,5 %), 16 nagari prioritas 2 (15,5 %) dan 21 nagari prioritas 3 (21,1 %) (Peta 02).

Tabel 2.1 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Nagari	Persentase
1	1	0,1514	16	15,5
2	2	0,1318	16	15,5
3	3	0,1139	21	20,4
4	4	0,0946	19	18,5
5	5	0,0670	16	15,5
6	6	0	15	14,6

2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Strategi dasar pengembangan Kabupaten Padang Pariaman ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengarahkan pengembangan kawasan sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan yang telah digariskan. Jadi pada dasarnya strategi ini, sebagai media dalam menentukan rencana pengembangan kabupaten lebih lanjut agar sesuai dengan apa yang dimiliki atau keadaan potensi dan masalah di wilayah perencanaan. Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman, maka strategi penataan ruang seperti:

1. Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian :
 - a) Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kabupaten dan pembatasan pembangunan prasarana yang memotong kawasan persawahan untuk mempertahankan fungsinya sebagai aset kabupaten dalam rangka mendukung program strategis ketahanan pangan nasional;
 - b) mengupayakan peningkatan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis dan mekanisasi dengan penggunaan alat-alat pertanian modern;

- c) memperkuat kelembagaan bagi petani seperti pemberian kredit, manajemen pemasaran dan distribusi produk pertanian.
2. Strategi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui program kegiatan pemantauan dan pengawasan dibidang perdagangan meliputi, pemantauan ketersediaan, distribusi dan harga barang pokok di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami penurunan dari 8,91% (36,34 ribu jiwa) tahun 2016 menjadi 6,95 % (28,98 ribu jiwa) tahun 2020.

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan
Kabupaten Padang Pariaman

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk miskin	8,91	8,46	8,04	7,10	6,95

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2021, BPS

Pada tahun 2020, terdapat 16 nagari yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 0,0677 (15,5 %) masuk prioritas 1, kemudian sebanyak 16 nagari (15,5 %) masuk prioritas 2, dan 20 nagari (19,4%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 52 nagari tersebut (Peta 03).

Tabel 3.1 Sebaran nagari dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	Jumlah Nagari	Persentase
1	0,0677	16	15,5
2	0,0496	16	15,5
3	0,0342	20	19,5
4	0,0178	21	20,4
5	0,0101	16	15,5
6	0,0000	14	13,6

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa

dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2019, BPS, di Kabupaten Padang Pariaman hampir semua nagari memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun, namun ada 2 nagari yang kurang memadai akses penghubungnya yaitu di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak di Nagari Bisati dan Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak yang merupakan Nagari pemekaran di Kabupaten Padang Pariaman. Dimana dalam pemetaan FSVA bernilai 4 yang berarti untuk akses penghubung di Kabupaten Padang Pariaman tidak ada permasalahan sehingga dapat dilalui oleh kendaraan sepanjang tahunnya (Peta 04).

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar essential masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) paling tidak untuk kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan

- Perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial yang ditujukan bagi kelompok PPKS keluarga miskin yang termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin
- Perlindungan dan jaminan sosial terutama dalam aspek alam dan atau sosial terutama dalam aspek ketersediaan kebutuhan dasar esensial pada saat bencana dan pasca bencana.
- Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bertujuan untuk menguatkan peran-peran PPKS dalam penanganan berbagai masalah sosial yang ada.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat nagari/perdesaan/kelurahan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agribisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh

BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk nagari/desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak⁴. Kualitas Air harus

⁴ Permenkes 416 Tahun 1990

memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. Pengawasan kualitas air bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Dari 103 nagari, di Kabupaten Padang Pariaman 16 nagari masuk dalam prioritas 1 (15,5 %), 16 nagari prioritas 2 (15,5 %), 20 nagari prioritas 3 (19,5 %), 21 nagari masuk prioritas 4 (20,4%), 16 nagari masuk prioritas 5 (15,5%) dan 14 nagari prioritas 6 (13,4 %) (Peta 05).

Tabel 4.1 Sebaran nagari berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih	Jumlah Nagari	Persentase
1	0,2661	16	15,5
2	0,1492	16	15,5
3	0,0775	20	19,5
4	0,0455	21	20,4
5	0,0212	16	15,5
6	0,0000	14	13,6

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk nagari per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk nagari per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk nagari per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di nagari berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan	Jumlah nagari	Persentase
1	3,1999	16	15,5
2	1,5007	16	15,5
3	0,7438	20	19,7
4	0,4708	21	20,4
5	0,2960	16	15,5
6	0	14	13,6

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah balita stunting di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 sebanyak 1.050 balita. Jumlah balita stunting yang tinggi ditemukan di Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 238 balita dan terendah ditemukan di Kecamatan Padang Sago sebanyak 3 balita. Tingginya jumlah balita stunting pada tahun 2020 disebabkan oleh banyak faktor antara lain; (1) kesejahteraan penduduk yang rendah, apalagi tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga; (2) keadaan sanitasi yang tidak bagus dan sumber air bersih yang tidak memadai; (3) pola asuh dan pengetahuan ibu yang rendah dalam pemberian makanan untuk balita; (4) adanya infeksi/penyakit.

Tabel 4.3 Data Balita Stunting Kab. Padang Pariaman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Batang Anai	29
2	Lubuk Alung	238
3	Sintuk Toboh Gadang	24
4	Ulakan Tapakis	62
5	Nan Sabaris	31
6	2 x 11 Enam Lingkung	55
7	Enam Lingkung	24
8	2 x 11 Kayutanam	19
9	Patamuan	129
10	VII Koto Sungai Sarik	61
11	Padang Sago	2
12	V Koto Kampung Dalam	47
13	V Koto Timur	65
14	Sungai Limau	60
15	Batang Gasan	13
16	Sungai Geringging	78
17	IV Koto Aur Malintang	113
	Kab. Padang Pariaman	1.050

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 adalah 22 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di

Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 ada sebanyak 9 jiwa. Angka kematian balita tertinggi tahun 2020 terdapat di Kecamatan Patamuan (4 jiwa) dan terendah tahun 2020 terdapat di Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakih, 2 x 11 Kayutanam, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur dan Sungai Limau (0 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman adalah Kecamatan Enam Lingkung dan VII Koto Sungai Sarik sebanyak 2 jiwa dan terendah tahun 2020 terdapat di Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, 2 x 11 Enam Lingkung, 2 x 11 Kayutanam, Padang Sago, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur dan Sungai Geringging sebanyak 0 jiwa.

Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Kematian Balita dan Kematian Ibu per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu
1	Batang Anai	0	0
2	Lubuk Alung	3	0
3	Sintuk Toboh Gadang	3	1
4	Ulakan Tapakis	0	0
5	Nan Sabaris	2	0
6	2 x 11 Enam Lingkung	2	0
7	Enam Lingkung	1	2
8	2 x 11 Kayutanam	0	0
9	Patamuan	4	1

10	VII Koto Sungai Sarik	2	2
11	Padang Sago	1	0
12	V Koto Kampung Dalam	0	0
13	V Koto Timur	0	0
14	Sungai Limau	0	1
15	Batang Gasan	1	1
16	Sungai Geringging	1	0
17	IV Koto Aur Malintang	2	1
	Kab. Padang Pariaman	22	9

4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Padang Pariaman tahun 2021-2025 khususnya dalam bidang pangan dan gizi tercantum pada Tabel 4.1

Tabel 4.5 Indikator dan Sasaran Pangan

No	Indikator	Status Awal 2021	Target 2025
1.	Produksi padi (ton)	287.374,00	305.008,00
2.	Produktivitas pangan Utama (ton) per hektar	4,8 %	5,29 %
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,50	90,10

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2021-2025

Stunting sebagai sasaran indikator pangan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025. Untuk itu Kabupaten Padang Pariaman menargetkan penurunan angka stunting Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 dengan 14 Nagari Lokus dan pada tahun 2022 ada 39 Nagari Lokus stunting, dimana 23 Nagari prioritas 1 dan 16 Nagari di prioritas 2.

Dalam penanganan penurunan prevalensi stunting Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan 5 pilar penanganan yang telah ditetapkan pemerintah pusat yaitu;

1. Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara
2. Kampanye nasional berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas
3. Konvergensi koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat
4. Gizi dan Ketahanan pangan
5. Pemantauan dan evaluasi

Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal.

Khusus untuk pilar ke 4 yaitu Gizi dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten telah melakukan pendekatan program dan kegiatan Ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 -2025.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariman Tahun 2021-2025, kebijakan terkait konsumsi di Kabupaten Padang Pariaman pada misi ke 2 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas Dan Berbudaya. Dimana pada sasaran ke empatnya yaitu Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan
2. Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
3. Meningkatkan pembinaan budidaya peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil peternakan dan perikanan
5. Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian
6. Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil pertanian

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Masalah gizi kronis (*stunting*) masih tetap ada di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2020 data stunting Kabupaten Padang Pariaman sebesar 1.050 jiwa.

Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu yaitu mulai dari pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupan (1000 hari pertama kehidupan) . Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan bayi dan anak dan rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan *stunting*. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut bersifat multisektor. Pendekatan multisektor dalam pangan dan gizi sangat diperlukan karena perbaikan melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam *stunting* pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitiv yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan.

Intervensi gizi sensitive tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan dan keluarga berencana. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi adalah dengan perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

1. Intervensi Gizi Spesifik

Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 HPK. Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relative pendek.

Kegiatan intervensi Gizi Spesifik antara lain :

a. Intervensi dengan Sasaran Ibu Hamil, antara lain

- Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis
- Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat
- Mengatasi kekurangan iodium
- Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil 5. Melindungi ibu hamil dari malaria.

b. Intervensi dengan Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan

- Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/colostrum)
- Mendorong pemberian ASI Eksklusif.

- c. Intervensi dengan Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan
- Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI
 - Menyediakan obat cacing
 - Menyediakan suplementasi zink
 - Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan
 - Memberikan perlindungan terhadap malaria
 - Memberikan imunisasi lengkap
 - Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
 - Kegiatan ini dilakukan oleh sektor kesehatan saja dan dari hasil penelitian hanya bisa berkontribusi sebesar 30 % pada penurunan *stunting*.

2. Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 % pada penurunan *stunting*. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 HPK. Kegiatan terkait intervensi gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakkan secara lintas sektor.

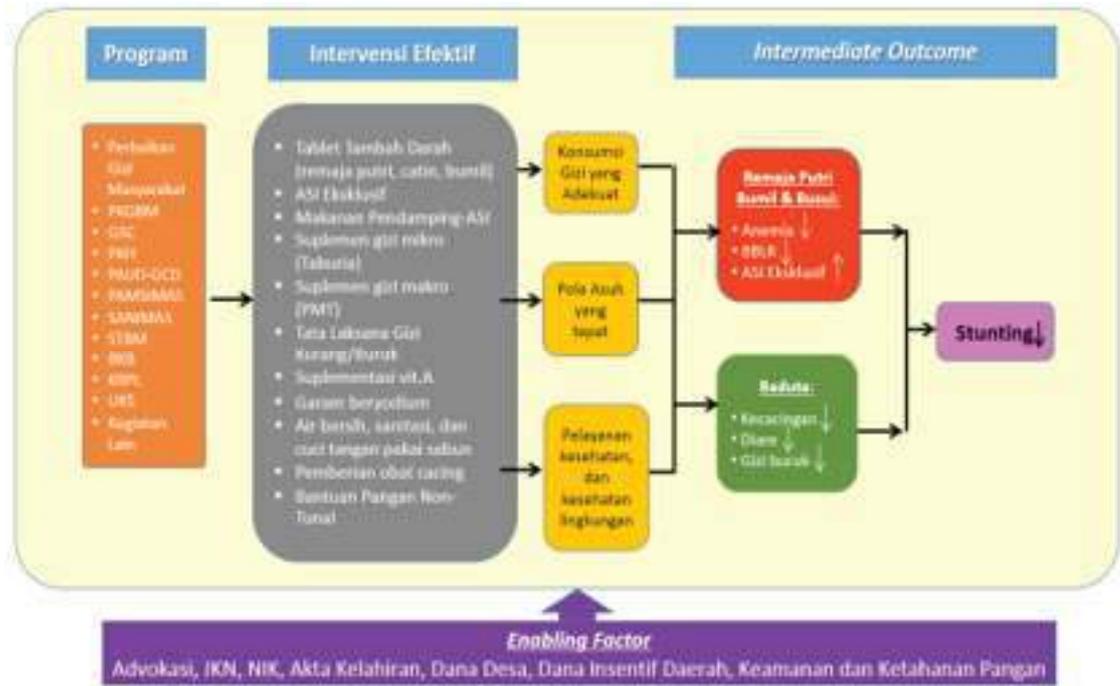
Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif antara lain sebagai berikut :

- a. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih.
- b. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
- c. Melakukan forifikasi bahan pangan.

- d. Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan masalah kesehatan dan gizi.
- e. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
- f. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB).
- g. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- h. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua.
- i. Memberikan pendidikan pada anak usia Dini (PAUD).
- j. Memberikan pendidikan gizi masyarakat.
- k. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja.
- l. Menyediakan bantuan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

Kedua kerangka intervensi *stunting* diatas adalah upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi *stunting* seperti terlihat pada gambar 3.

Gambar 3 Result Framework Pelaksanaan Intervensi Gizi Terintegrasi



Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.

Investasi dibidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 07) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, nagari-nagari dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (nagari) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (nagari) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (nagari) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (nagari) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 103 nagari/desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman maka didapatkan 5 nagari/desa/kelurahan masuk dalam prioritas 2, 18 nagari/desa/kelurahan masuk dalam prioritas 3, 42 nagari/desa/kelurahan masuk dalam prioritas 4, 30 nagari/desa/kelurahan masuk dalam prioritas 5 dan 8 nagari/desa/kelurahan masuk dalam prioritas 6.

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Nagari	Persentase
1	0	0
2	5	4,84
3	18	17,48
4	42	40,78
5	30	29,13
6	8	7,77

Nagari rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 hanya terdapat di wilayah Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (1 Nagari) yaitu Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak, Kecamatan V Koto Timur (1 Nagari) yaitu Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Batang Gasan (1 Nagari) yaitu Malai V Suku Timur dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang (2 Nagari) yaitu Nagari III Koto Aur Malintang Timur dan Nagari Balai Baik Malai III Koto.

Nagari yang rentan terhadap kerawanan pangan pada prioritas 3 terdapat di 18 wilayah antara lain :

1. Kecamatan Batang Anai (1 Nagari) yaitu Nagari Sungai Buluh Timur
2. Kecamatan Lubuk Alung (1 Nagari) yaitu Nagari Aie Tajun Lubuk Alung
3. Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (1 Nagari) yaitu Nagari Bisati Sungai Sariak
4. Kecamatan Patamuan (3 Nagari) yaitu Nagari Sungai Durian, Tandikat dan Tandikat Barat.
5. Kecamatan Padang Sago (2 Nagari) yaitu Nagari Koto Dalam dan Koto Dalam Selatan.
6. Kecamatan V Koto Kampung Dalam (1 Nagari) yaitu Nagari Sikucur Tengah
7. Kecamatan V Koto Timur (3 Nagari) yaitu Nagari Limau Puruik, Kudu Gantiang, dan Kudu Gantiang Barat.
8. Kecamatan Sungai Limau (2 Nagari) yaitu Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir dan Guguak Kuranji Hilir.
9. Kecamatan Batang Gasan (2Nagari) yaitu Nagari Gasan Gadang dan Malai V Suku.
10. Kecamatan Sungai Geringging (2 Nagari) yaitu Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu dan Sungai Sirah Kuranji Hulu.

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Nagari rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh:

1. Tingginya jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, sehingga masyarakat kesulitan dalam akses pangan untuk pemenuhan pangan keluarga;
2. Masih banyak rumah tangga yang kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih dalam kehidupan sehari-hari;
3. Jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa/kelurahan;

Nagari rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh:

1. Tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah, menyebabkan masyarakat kesulitan dalam akses pangan untuk pemenuhan pangan keluarga sehari-hari dan kurangnya sarana dan prasarana ekonomi di desa/kelurahan;
2. Masih banyak rumah tangga yang kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih dalam kehidupan sehari-hari, disebabkan letak geografis wilayah;
3. Jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa/kelurahan, jumlah tenaga kesehatan penting dalam penurunan angka pesakitan dan peningkatan pengetahuan mengenai gizi keluarga;

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (nagari), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah nagari diprioritaskan pada:

- Nagari - nagari prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang (prioritas 2) dan Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, Padang Sago, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau, Batang Gasan, serta Kecamatan Sungai Geringging (prioritas 3)
- Nagari-nagari yang lokasinya di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain.
- Merupakan nagari-nagari dengan keadaan geografis yang berbukit.
- Nagari dengan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk nagari.
- Nagari yang memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah,
- Nagari yang memiliki sarana prasarana pangan yang tidak memadai.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

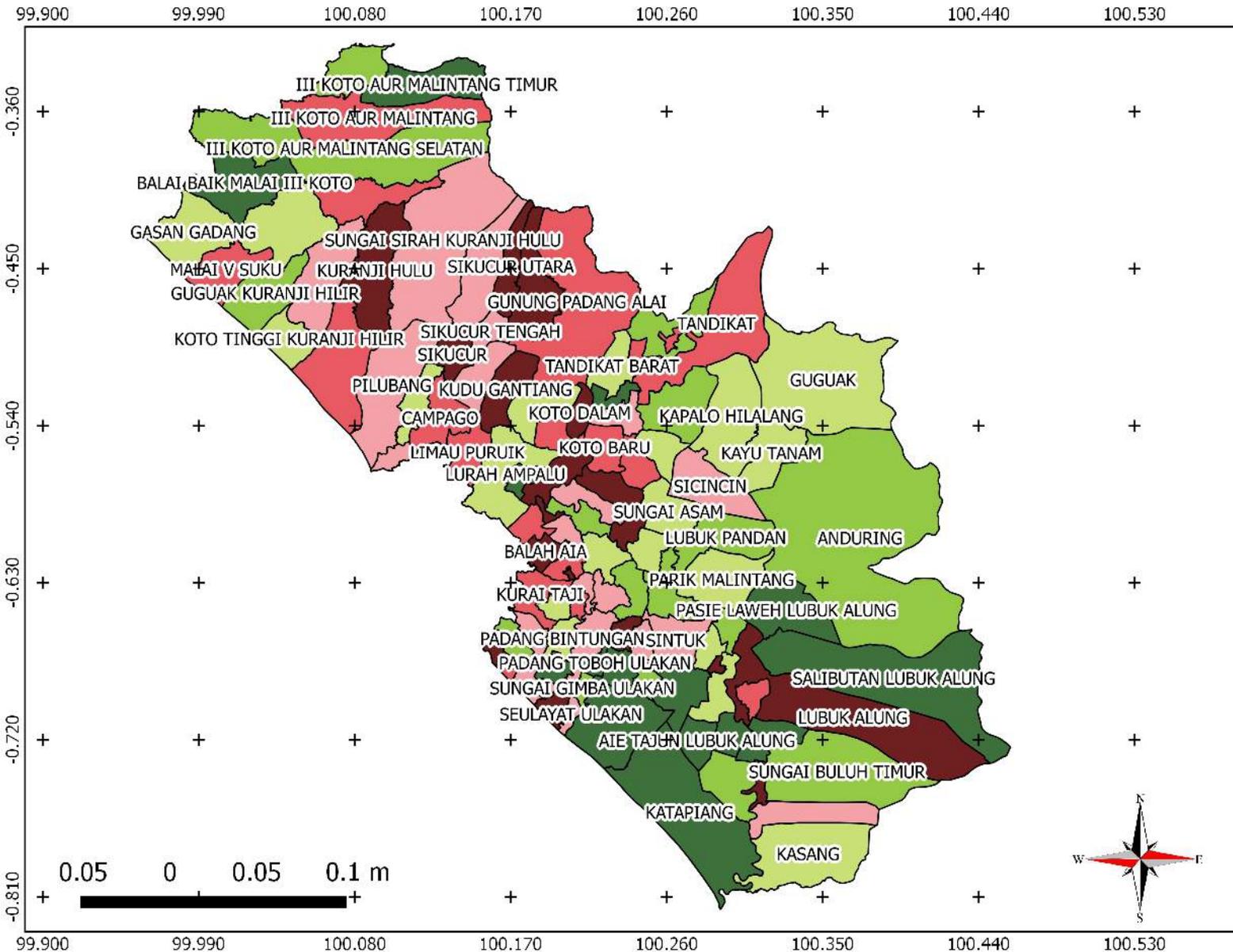
Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal seperti program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di nagari.

- b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- d. Penyediaan tenaga kesehatan sesuai dengan jumlah dan kepadatan penduduk wilayah



**DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KAB. PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN (FOOD
SECURITY AND VUNERABILITY
ATLAS /FSVA) TAHUN 2021**

Legend

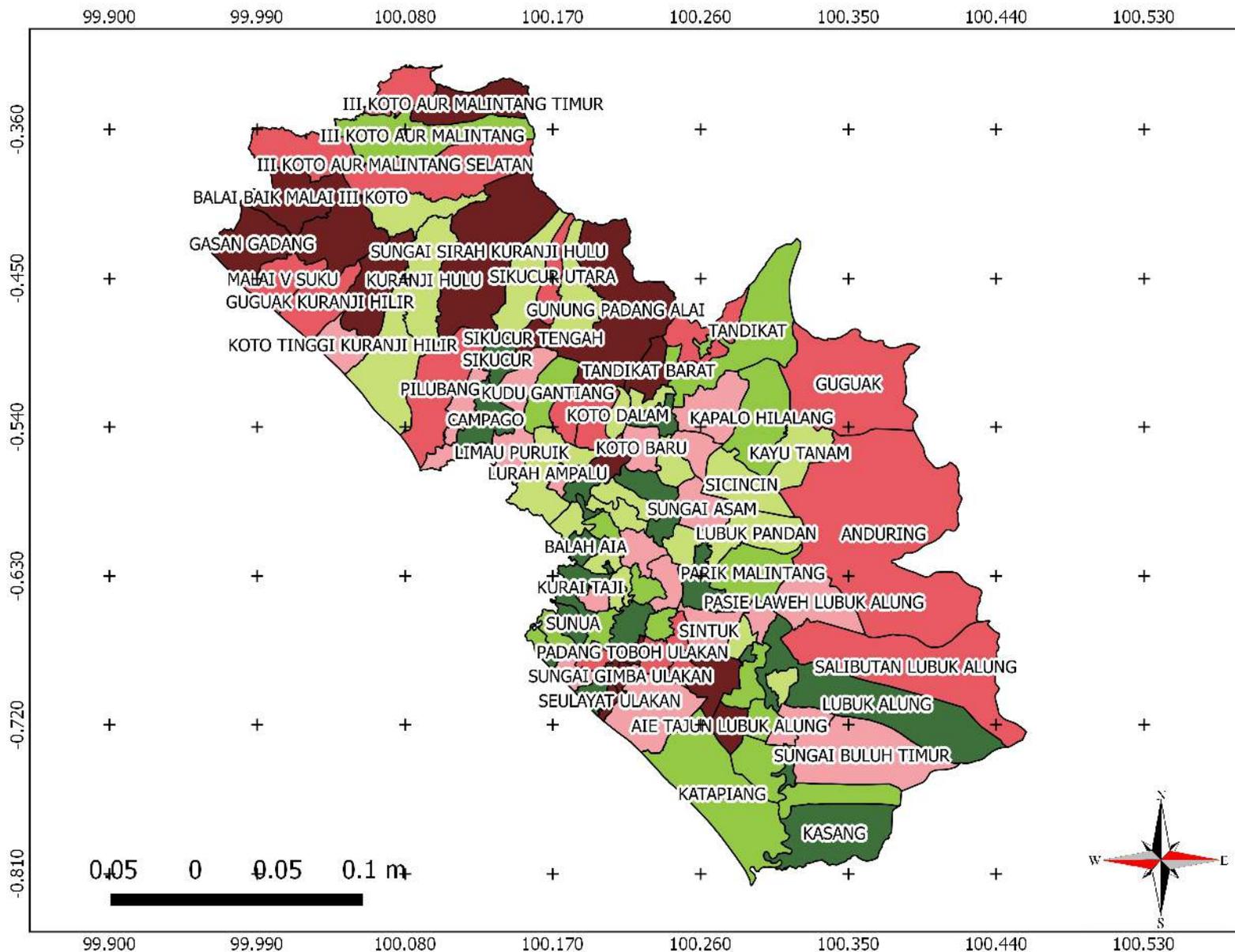
LUAS LAHAN PERTANIAN

- Nagari Prioritas 1
- Nagari Prioritas 2
- Nagari Prioritas 3
- Nagari Prioritas 4
- Nagari Prioritas 5
- Nagari Prioritas 6

DISUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN

PETA 01

SUMBER DATA :
1. BPS KAB. PADANG PARIAMAN
2. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KAB. PADANG PARIAMAN



**DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KAB. PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN (FOOD
SECURITY AND VUNERABILITY
ATLAS /FSVA) TAHUN 2021**

Legend

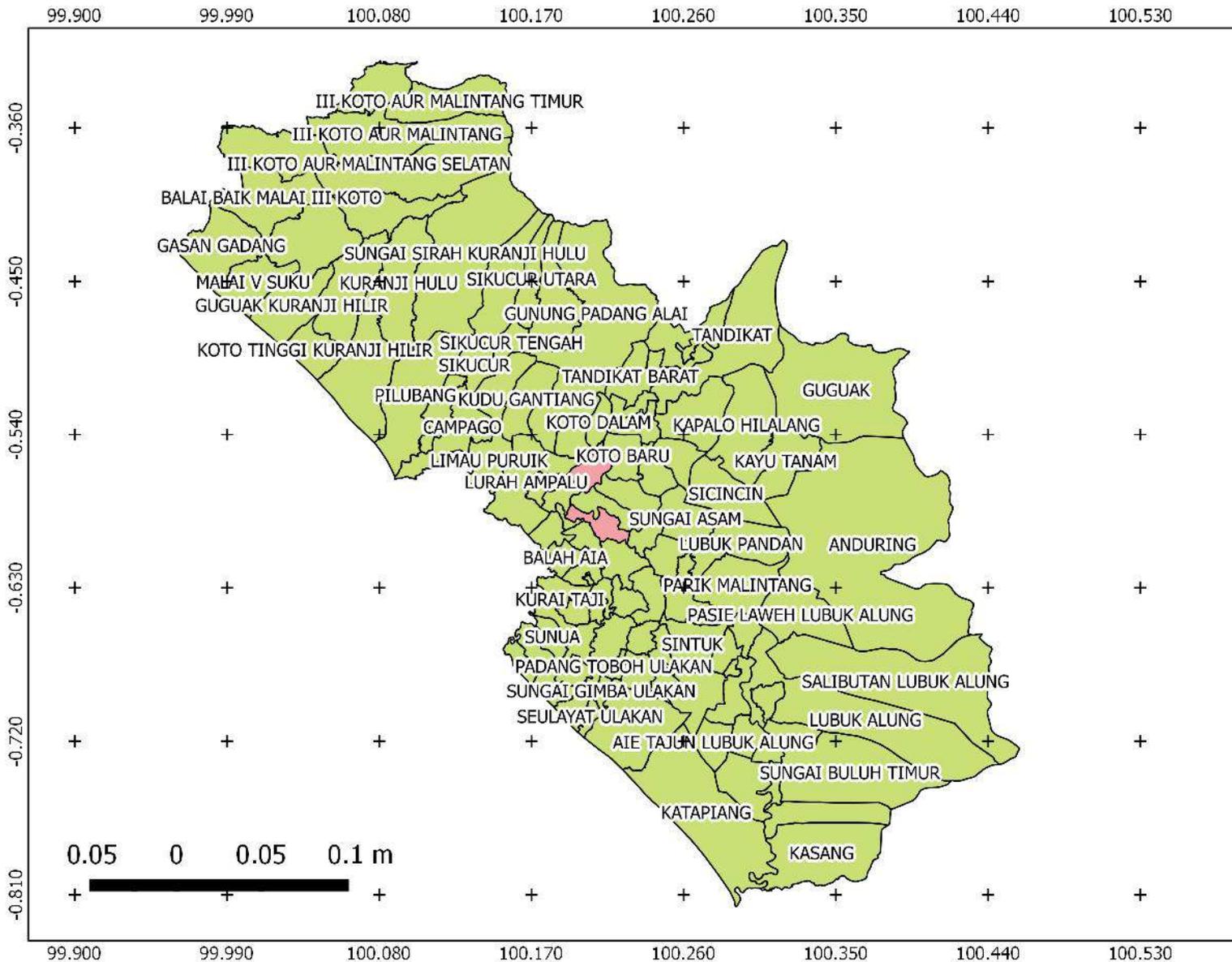
Penduduk Tidak Sejahtera

- Nagari Prioritas 1
- Nagari Prioritas 2
- Nagari Prioritas 3
- Nagari Prioritas 4
- Nagari Prioritas 5
- Nagari Prioritas 6

DISUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN

PETA 03

SUMBER DATA :
1. DATA TERPADU PPFM, SK JAN
2019



**DINAS PERTANIAN DAN
 KETAHANAN PANGAN
 KAB. PADANG PARIAMAN
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PETA KETAHANAN DAN
 KERENTANAN PANGAN (FOOD
 SECURITY AND VUNERABILITY
 ATLAS /FSVA) TAHUN 2021**

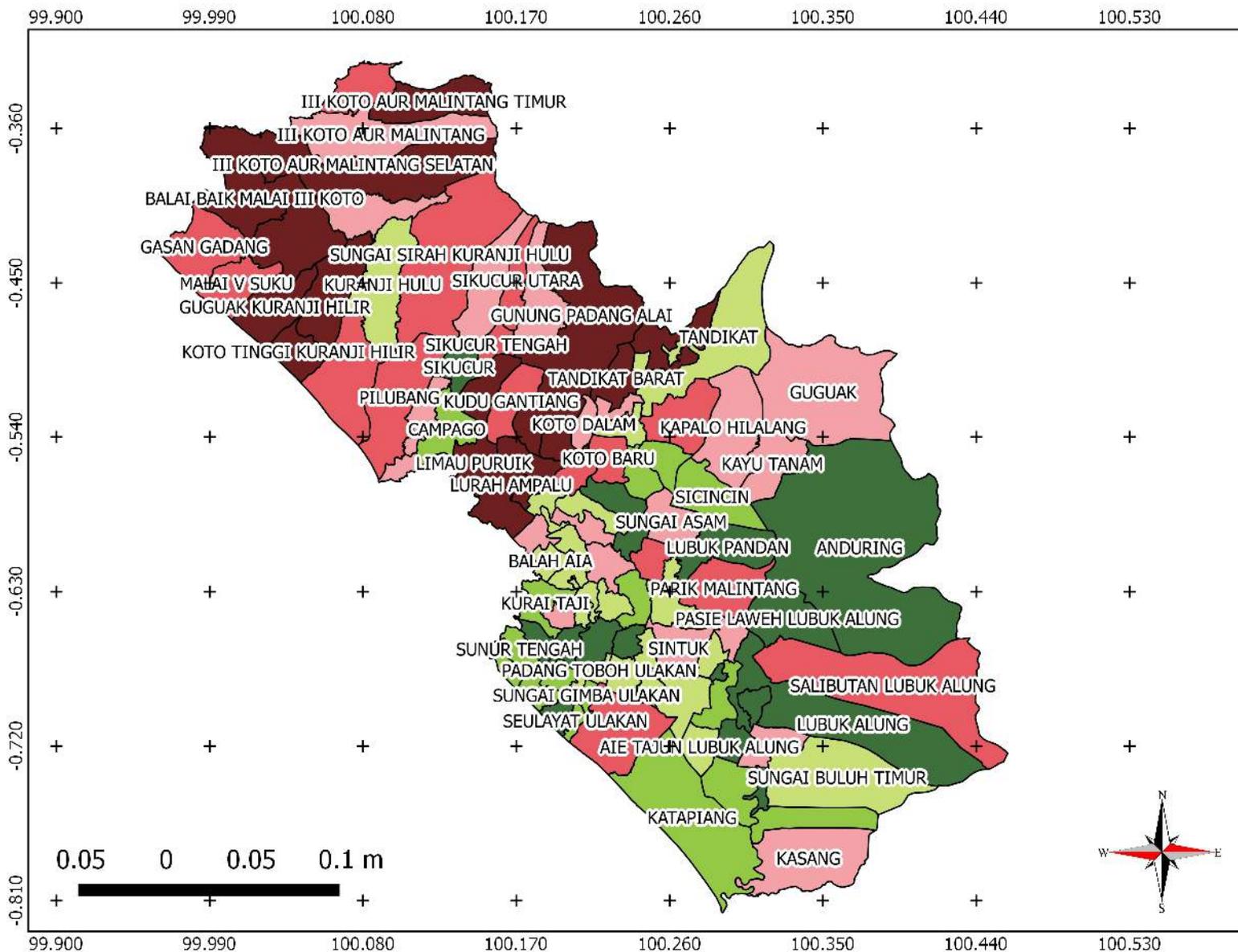
Legend

- AKSES PENGHUBUNG**
- Nagari Prioritas 3
 - Nagari Prioritas 4

**DISUSUN OLEH :
 TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN
 DAN KERENTANAN PANGAN**

PETA 04

**SUMBER DATA :
 1. PODES 2019**





**DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KAB. PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN (FOOD
SECURITY AND VUNERABILITY
ATLAS /FSVA) TAHUN 2021**

Legend

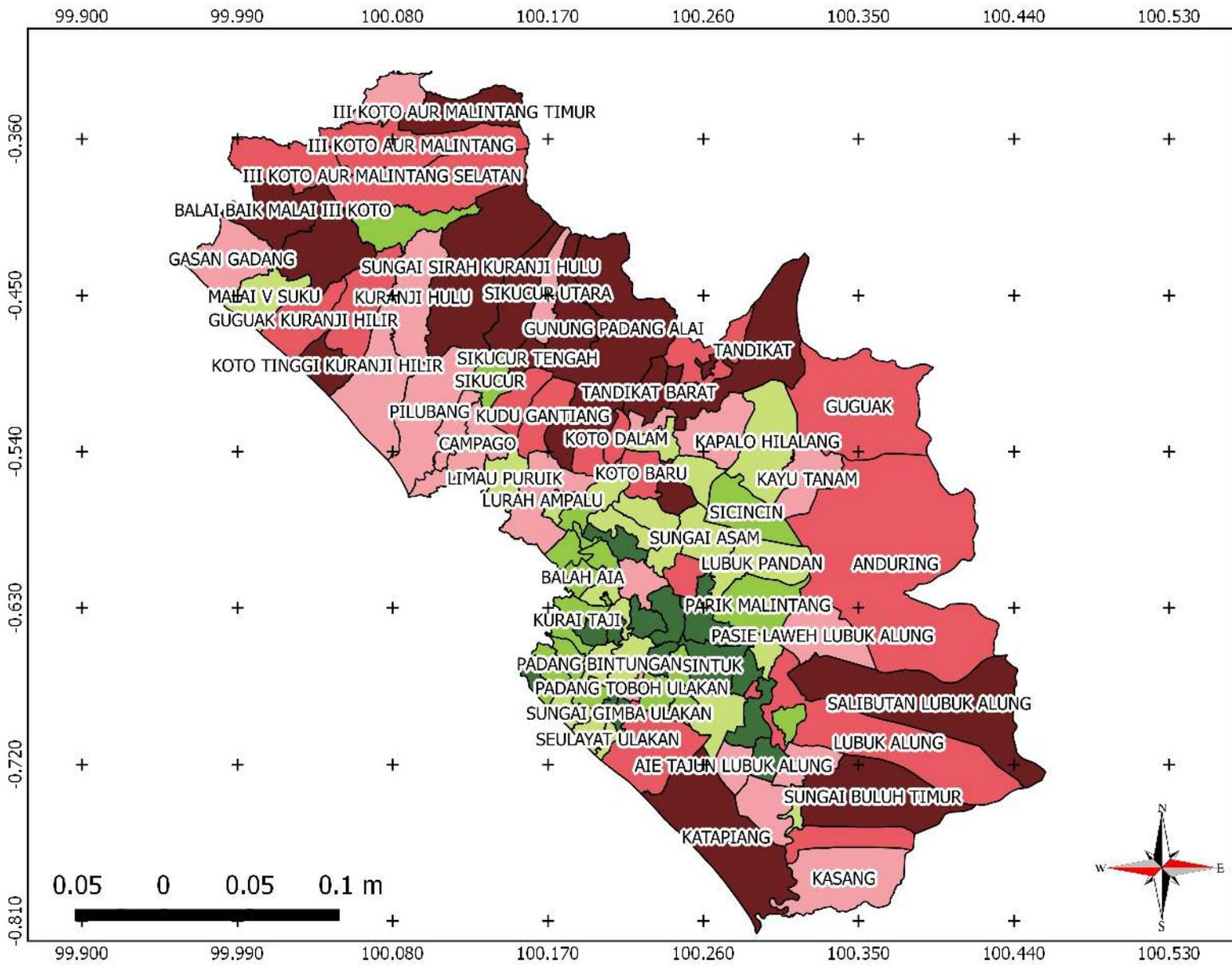
RT TANPA AKSES AIR BERSIH

- Nagari Prioritas 1
- Nagari Prioritas 2
- Nagari Prioritas 3
- Nagari Prioritas 4
- Nagari Prioritas 5
- Nagari Prioritas 6

DISUSUN OLEH :
**TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN**

PETA 05

SUMBER DATA :
1. DATA TERPADU PPFM, SK JAN
2019





**DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KAB. PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN (FOOD
SECURITY AND VUNERABILITY
ATLAS /FSVA) TAHUN 2021**

Legend

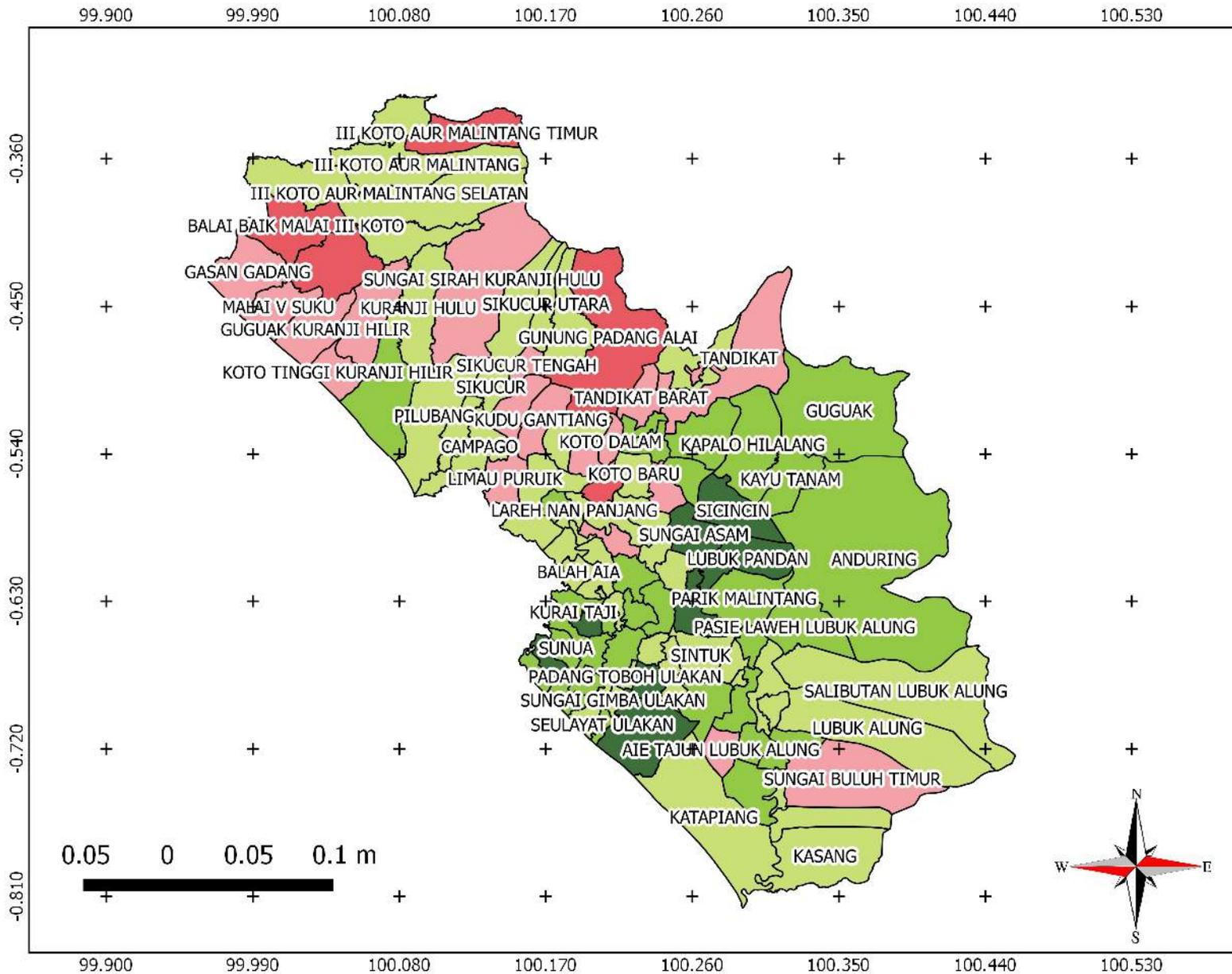
JUMLAH TENAGA KESEHATAN

- Nagari Prioritas 1
- Nagari Prioritas 2
- Nagari Prioritas 3
- Nagari Prioritas 4
- Nagari Prioritas 5
- Nagari Prioritas 6

DISUSUN OLEH :
**TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN**

PETA 06

SUMBER DATA :
1. BPS KAB. PADANG PARIAMAN



**DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KAB. PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN (FOOD
SECURITY AND VUNERABILITY
ATLAS /FSVA) TAHUN 2021**

Legend

Komposit Pd. Pariaman

- Nagari Prioritas 2
- Nagari Prioritas 3
- Nagari Prioritas 4
- Nagari Prioritas 5
- Nagari Prioritas 6

**DISUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN**

PETA 07

- SUMBER DATA :
1. BPS KAB. PADANG PARIAMAN
 2. DINAS KESEHATAN KAB. PADANG PARIAMAN
 3. DATA TERPADU PPFM, SK JAN 2019

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	BATANG ANAI	1306010	1306010001	KATAPIANG	6	2	5	4	5	1	70.83	43	4
2	BATANG ANAI	1306010	1306010002	KASANG	4	1	6	4	3	3	67.59	59	4
3	BATANG ANAI	1306010	1306010003	SUNGAI BULUH	1	1	6	4	6	4	65.82	67	4
4	BATANG ANAI	1306010	1306010004	BUAYAN LUBUK ALUNG	6	2	5	4	6	6	75.27	18	5
5	BATANG ANAI	1306010	1306010005	SUNGAI BULUH SELATA	3	2	5	4	5	2	68.34	54	4
6	BATANG ANAI	1306010	1306010006	SUNGAI BULUH BARAT	5	3	5	4	5	3	76.32	12	5
7	BATANG ANAI	1306010	1306010007	SUNGAI BULUH TIMUR	5	4	3	4	4	1	60.57	87	3
8	BATANG ANAI	1306010	1306010008	SUNGAI BULUH UTARA	6	5	3	4	3	3	77.49	10	5
9	LUBUK ALUNG	1306020	1306020001	LUBUK ALUNG	1	1	6	4	6	2	64.51	71	4
10	LUBUK ALUNG	1306020	1306020002	AIE TAJUN LUBUK ALUNG	6	2	1	4	4	3	57.99	92	3
11	LUBUK ALUNG	1306020	1306020003	SIKABU LUBUK ALUNG	2	3	4	4	6	5	70.23	47	4
12	LUBUK ALUNG	1306020	1306020004	PASIE LAWEH LUBUK ALUNG	6	3	3	4	6	3	76.01	15	5
13	LUBUK ALUNG	1306020	1306020005	PUNGGUNG KASIAK LUBUK ALUNG	6	1	1	4	4	4	75.99	16	5
14	LUBUK ALUNG	1306020	1306020006	BALAH HILIA LUBUK ALUNG	4	3	5	4	5	6	73.70	24	5
15	LUBUK ALUNG	1306020	1306020007	SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	4	2	4	4	4	6	70.94	41	4
16	LUBUK ALUNG	1306020	1306020008	SINGGULING LUBUK ALUNG	5	4	3	4	3	4	73.24	29	5
17	LUBUK ALUNG	1306020	1306020009	SALIBUTAN LUBUK ALUNG	6	6	2	4	2	1	65.17	69	4
18	SINTUK TOBOH GADA	1306021	1306021001	TOBOH GADANG	1	1	5	4	6	6	68.07	56	4
19	SINTUK TOBOH GADA	1306021	1306021002	SINTUK	3	3	3	4	3	6	69.42	49	4
20	SINTUK TOBOH GADA	1306021	1306021003	TOBOH GADANG BARAT	6	5	2	4	4	5	80.58	5	6
21	SINTUK TOBOH GADA	1306021	1306021004	TOBOH GADANG SELATAN	5	3	2	4	4	5	71.17	39	4
22	SINTUK TOBOH GADA	1306021	1306021005	TOBOH GADANG TIMUR	3	4	2	4	4	5	69.79	48	4
23	ULAKAN TAPAKIS	1306030	1306030001	TAPAKIS	6	5	3	4	2	2	80.47	6	6
24	ULAKAN TAPAKIS	1306030	1306030002	ULAKAN	1	1	6	4	6	4	66.41	65	4
25	ULAKAN TAPAKIS	1306030	1306030003	SEULAYAT ULAKAN	3	6	1	4	5	4	76.07	14	5
26	ULAKAN TAPAKIS	1306030	1306030004	SUNGAI GIMBA ULAKAN	5	4	1	4	5	6	71.00	40	4
27	ULAKAN TAPAKIS	1306030	1306030005	MANGGOPOH PALAK GADANG	3	4	3	4	5	4	71.19	38	5
28	ULAKAN TAPAKIS	1306030	1306030006	SANDI ULAKAN	6	3	2	4	5	5	73.86	22	5
29	ULAKAN TAPAKIS	1306030	1306030007	KAMPUANG GALAPUAN	3	6	1	4	4	6	67.86	57	4
30	ULAKAN TAPAKIS	1306030	1306030008	PADANG TOBOH ULAKAN	6	3	1	4	4	3	70.55	44	4
31	NAN SABARIS	1306040	1306040001	SUNUA	3	3	6	4	6	5	73.27	28	5
32	NAN SABARIS	1306040	1306040002	PADANG BINTUNGAN	4	5	5	4	6	4	78.05	9	5
33	NAN SABARIS	1306040	1306040003	PAUAH KAMBA	3	4	6	4	6	4	75.49	17	5
34	NAN SABARIS	1306040	1306040004	KAPALO KOTO	2	4	4	4	4	6	72.10	36	5
35	NAN SABARIS	1306040	1306040005	KURAI TAJI	2	5	6	4	5	5	76.23	13	5
36	NAN SABARIS	1306040	1306040006	SUNUR BARAT	1	6	5	4	5	6	76.45	11	5
37	NAN SABARIS	1306040	1306040007	SUNUR TENGAH	5	5	5	4	5	5	81.78	3	6
38	NAN SABARIS	1306040	1306040008	PADANG KANDANG PULAU	3	4	4	4	4	4	70.87	42	4
39	NAN SABARIS	1306040	1306040009	KURAI TAJI TIMUR	4	6	3	4	3	6	80.35	7	6
40	2 X 11 ENAM LINGKUI	1306050	1306050001	LUBUK PANDAN	5	6	4	4	6	4	82.84	1	6
41	2 X 11 ENAM LINGKUI	1306050	1306050002	SICINCIN	3	6	4	4	5	5	78.90	8	6
42	2 X 11 ENAM LINGKUI	1306050	1306050003	SUNGAI ASAM	4	6	3	4	3	4	81.85	2	6
43	ENAM LINGKUNG	1306051	1306051001	KOTO TINGGI	5	3	3	4	5	6	73.02	30	5
44	ENAM LINGKUNG	1306051	1306051002	GADUA	3	5	5	4	4	6	74.77	20	5
45	ENAM LINGKUNG	1306051	1306051003	TOBOH KETEK	4	5	4	4	2	2	70.25	46	4
46	ENAM LINGKUNG	1306051	1306051004	PAKANDANGAN	5	5	6	4	4	6	80.61	4	6
47	ENAM LINGKUNG	1306051	1306051005	PARIK MALINTANG	4	4	5	4	2	5	72.32	33	5

48	2 X 11 KAYU TANAM	1306052	1306052001	KAPALO HILALANG	4	4	5	4	3	4	73.27	27	5
49	2 X 11 KAYU TANAM	1306052	1306052002	KAYU TANAM	4	5	4	4	3	3	73.73	23	5
50	2 X 11 KAYU TANAM	1306052	1306052003	GUGUAK	4	6	2	4	3	2	71.95	37	5
51	2 X 11 KAYU TANAM	1306052	1306052004	ANDURING	5	5	2	4	6	2	72.17	35	5
52	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060001	BALAH AIA	1	2	6	4	4	5	68.61	52	4
53	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060002	LAREH NAN PANJANG	1	1	6	4	4	5	65.30	68	4
54	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060003	LURAH AMPALU	4	4	4	4	1	3	64.03	76	4
55	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060004	SUNGAI SARIAK	1	2	6	4	6	4	68.54	53	4
56	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060005	BALAH AIE TIMUR	2	2	4	4	4	4	66.30	66	4
57	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060006	BALAH AIE UTARA	3	2	5	4	4	5	69.01	50	4
58	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060007	LAREH NAN PANJANG S	2	3	4	4	3	5	67.76	58	4
59	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060008	LAREH NAN PANJANG B	6	5	3	4	1	4	73.01	31	5
60	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060009	LIMPATO SUNGAI SARIAK	4	5	3	4	3	3	73.40	26	5
61	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060010	BISATI SUNGAI SARIAK	5	2	4	3	3	6	55.17	97	3
62	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060011	LAREH NAN PANJANG S	3	3	4	4	4	4	70.49	45	4
63	VII KOTO SUNGAI SAR	1306060	1306060012	AMBUANG KAPUA SUN	1	4	1	3	2	4	46.65	102	2
64	PATAMUAN	1306061	1306061001	SUNGAI DURIAN	2	2	4	4	5	1	61.03	84	3
65	PATAMUAN	1306061	1306061002	TANDIKAT	2	2	5	4	4	1	59.41	88	3
66	PATAMUAN	1306061	1306061003	TANDIKAT UTARA	5	4	2	4	1	2	66.69	64	4
67	PATAMUAN	1306061	1306061004	KAMPUANG TANJUANG	4	4	3	4	5	4	72.28	34	5
68	PATAMUAN	1306061	1306061005	TANDIKAT SELATAN	5	6	3	4	2	3	75.25	19	5
69	PATAMUAN	1306061	1306061006	TANDIKAT BARAT	4	5	1	4	1	1	58.65	91	3
70	PADANG SAGO	1306062	1306062001	KOTO DALAM	1	3	4	4	3	2	62.45	81	3
71	PADANG SAGO	1306062	1306062002	BATU KALANG	3	3	6	4	4	4	73.67	25	5
72	PADANG SAGO	1306062	1306062003	KOTO BARU	2	6	3	4	2	2	68.09	55	4
73	PADANG SAGO	1306062	1306062004	KOTO DALAM BARAT	4	6	2	4	1	1	64.12	75	4
74	PADANG SAGO	1306062	1306062005	KOTO DALAM SELATAN	2	5	2	4	1	2	60.72	86	3
75	PADANG SAGO	1306062	1306062006	BATU KALANG UTARA	6	3	4	4	3	3	74.72	21	5
76	V KOTO KP DALAM	1306070	1306070001	CAMPAGO	2	1	6	4	5	3	66.97	61	4
77	V KOTO KP DALAM	1306070	1306070002	SIKUCUR	1	1	6	4	6	5	66.70	63	4
78	V KOTO KP DALAM	1306070	1306070003	CAMPAGO SELATAN	3	1	3	4	3	3	64.12	74	4
79	V KOTO KP DALAM	1306070	1306070004	CAMPAGO BARAT	4	1	3	4	3	3	67.09	60	4
80	V KOTO KP DALAM	1306070	1306070005	SIKUCUR TENGAH	3	2	1	4	2	1	54.72	98	3
81	V KOTO KP DALAM	1306070	1306070006	SIKUCUR BARAT	3	3	4	4	3	1	63.23	79	4
82	V KOTO KP DALAM	1306070	1306070007	SIKUCUR UTARA	1	6	2	4	2	3	66.90	62	4
83	V KOTO KP DALAM	1306070	1306070008	SIKUCUR TIMUR	1	4	4	4	3	1	64.22	72	4
84	V KOTO TIMUR	1306071	1306071001	LIMAU PURUIK	2	3	3	4	1	4	59.28	89	3
85	V KOTO TIMUR	1306071	1306071002	KUDU GANTIANG	1	1	5	4	2	2	60.94	85	3
86	V KOTO TIMUR	1306071	1306071003	GUNUNG PADANG ALA	2	2	1	4	1	1	51.95	99	2
87	V KOTO TIMUR	1306071	1306071004	KUDU GANTIANG BARA	3	4	3	4	1	2	57.91	93	3
88	SUNGAI LIMAU	1306080	1306080001	PILUBANG	3	2	2	4	2	3	64.21	73	4
89	SUNGAI LIMAU	1306080	1306080002	KURANJI HILIR	2	6	4	4	2	3	72.83	32	5
90	SUNGAI LIMAU	1306080	1306080003	KOTO TINGGI KURANJI I	4	5	3	4	1	1	61.26	83	3
91	SUNGAI LIMAU	1306080	1306080004	GUGUAK KURANJI HILIR	5	1	2	4	1	2	56.53	95	3
92	BATANG GASAN	1306081	1306081001	GASAN GADANG	4	4	1	4	2	3	59.05	90	3
93	BATANG GASAN	1306081	1306081002	MALAI V SUKU	2	3	2	4	2	4	61.33	82	3
94	BATANG GASAN	1306081	1306081003	MALAI V SUKU TIMUR	4	4	1	4	1	1	40.50	103	2
95	SUNGAI GERINGGING	1306090	1306090001	KURANJI HULU	1	1	4	4	4	3	63.92	77	4
96	SUNGAI GERINGGING	1306090	1306090002	MALAI III KOTO	2	3	4	4	3	5	68.89	51	4
97	SUNGAI GERINGGING	1306090	1306090003	BATU GADANG KURANJ	3	4	1	4	1	2	57.63	94	3

98	SUNGAI GERINGGING	1306090	1306090004	SUNGAI SIRAH KURANJI	3	3	1	4	2	1	55.83	96	3
99	IV KOTO AUR MALINT	1306100	1306100001	III KOTO AUR MALINTA	2	1	5	4	3	2	62.94	80	4
100	IV KOTO AUR MALINT	1306100	1306100002	III KOTO AUR MALINTA	5	4	2	4	1	2	63.34	78	4
101	IV KOTO AUR MALINT	1306100	1306100003	III KOTO AUR MALINTA	6	6	1	4	1	1	50.67	101	2
102	IV KOTO AUR MALINT	1306100	1306100004	III KOTO AUR MALINTA	5	2	2	4	2	3	64.68	70	4
103	IV KOTO AUR MALINT	1306100	1306100005	BALAI BAIK MALAI III K	6	3	1	4	1	1	51.57	100	2

